

NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN KAUM MISKIN PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI

Farhan Kamiluloh

STAI Asy-Syukriyyah Tangerang
farhan.kamiluloh@asy-syukriyyah.ac.id

Mohamad Maulidin Alif Utama

STAI Asy-Syukriyyah Tangerang
m.maulidin@asy-syukriyyah.ac.id

Nirwan Nazaruddin

STAI Asy-Syukriyyah Tangerang
nirwan@asy-syukriyyah.ac.id

Abstrak: *Pembangunan negara berkembang selalu dilatarbelakangi oleh permasalahan keterbelakangan, kemiskinan, dan pengangguran. Krisis ekonomi pada pertengahan 1997 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi meningkat. Dampak keseluruhan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia adalah bertambahnya jumlah rumah tangga miskin di pedesaan maupun perkotaan, rusaknya struktur sosial yang disebabkan hilangnya pekerjaan dan hilangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan Tujuan riset ini adalah ingin mendeskripsikan Nilai-Nilai Islam dalam Pemberdayaan Kaum Miskin Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Adapun metode penelitian dalam riset ini adalah dengan Library riset. Hasil dari penelitian ini yakni PNPM Mandiri program penanggulangan kemiskinan di perkotaan terdapat nilai-nilai pendidikan Islam, nilai-nilai yang diajarkan dalam PNPM Mandiri program penanggulangan kemiskinan di perkotaan adalah sebagaiberikut: Nilai Khuluqiyah dan Nilai amaliyah.*

Katakunci: *Nilai-Nilai Islam, Kaum Miskin, (PNPM) Mandiri*

PENDAHULUAN

Pembangunan negara berkembang selalu dilatarbelakangi oleh permasalahan keterbelakangan, kemiskinan, dan pengangguran.¹ Krisis ekonomi pada pertengahan 1997 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi meningkat. Dampak keseluruhan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia adalah bertambahnya jumlah rumah tangga miskin di pedesaan maupun perkotaan, rusaknya struktur sosial yang disebabkan hilangnya pekerjaan dan hilangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Namun, seiring berjalannya waktu dan membaiknya perekonomian, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan pada Agustus

¹ Randy, R.W dan Riant, N.D, Manajemen Pemberdayaan: Sebuah pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007, hlm. 77.

1999 baik yang berada di daerah perkotaan maupun pedesaan.²

Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu kondisi yang ditolak oleh manusia, tetapi kenyataannya sulit untuk dihindarkan. Berdasarkan pengalaman yang terjadi menunjukkan bahwa selama ini Indonesia belum pernah terbebas dari kemiskinan.³ Upaya memperbaiki kualitas hidup manusia terutama pada lapisan masyarakat bawah, mulai mendapat perhatian setelah teridentifikasi adanya kelemahan dari paradigma pertumbuhan yang memiliki “*economic bias*”. Upaya tersebut secara tidak langsung melahirkan konsep pembangunan sosial yang dijiwai paradigma kebutuhan dasar untuk kesejahteraan atau bantuan bagi orang miskin.⁴ Pada prinsipnya kemiskinan bukanlah sekedar fenomena, akan tetapi lebih merupakan proses yang tereduksi akibat kerentanan yang melanda pada banyak faktor.

Dalam tiga dasawarsa terakhir ini, masyarakat kita mengalami perubahan sosial yang cukup pesat. Tetapi sayangnya perubahan tersebut tidak menghadirkan kemandirian dan kesejahteraan seperti masih banyaknya masyarakat miskin yang hanya selalu mengharapkan bantuan dari orang lain dan adanya pihak yang berkuasa telah berlaku yang tidak adil, tidak demokratis, dan memusuhi siapa yang di anggap menghalangi kehendaknya. Dengan keadaan yang demikian dalam era reformasi seperti sekarang banyak pihak mulai mempertanyakan kembali kebijaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁵ Akan tetapi, beberapa literatur menyebutkan bahwa konsep pemberdayaan sudah lahir sejak revolusi industri atau adajuga yang menyebut sejak lahirnya eropa modern pada abad 18 atau zaman *renaissance*, yaitu ketika orang mulai mempertanyakan diterminisme keagamaan.

Fokusnya pemberdayaan adalah lokalitas, karena *civil society* lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi ideologis maupun praktis. Pemberdayaan mengandung konteks pemihakan kepada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.⁶ Program pemberdayaan masyarakat di nilai sebagai salah satu strategi yang mampu menanggulangi kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat sendiri muncul 15 tahun belakangan dan memasuki tahun 2000-an yang telah banyak mendominasi wacana kebijakan publik. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi.

² Tim Crescent, Menuju Masyarakat Mandiri: Pengembangan Sistem Keterjam - nan Sosial, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 1.

³ Ambar Teguh, S, Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan, Yogyakarta: Gava Media, 2004, hlm. 3.

⁴ CSIS, Pemberdayaan Masyarakat Lapis Bawah Center for setrategis and Inte - national Studies/ jurnal, 1997, hlm. 42.

⁵ Sunyoto Usman, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. iv.

⁶ Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Sosial, Jakarta: PT. Kompas M - dia Nusantara, 2007, hlm. 28-29.

Untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah memutuskan meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007 dan sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan di perkotaan.⁷ Kondisi kelembagaan masyarakat yang tidak mengakar, tidak representatif dan tidak dapat di percaya pada umumnya tumbuh subur dalam situasi perilaku atau sikap masyarakat yang belum berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, yang pada akhirnya mendorong sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi masalahnya, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Menurut PNPM Mandiri, pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan perilaku masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan atau proses pembelajaran masyarakat dan penguatan kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakatnya.

Oleh sebab itu, dengan pandangan dan program melalui PNPM Mandiri sebagai lembaga masyarakat diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Pada dasarnya PNPM Mandiri sebagai program pemberdayaan masyarakat berbasis nilai, memiliki prinsip dasar yaitu pemberdayaan manusia seutuhnya untuk menumbuhkan kepedulian, kerelawanan dan perilaku yang berpihak pada masyarakat yang miskin dengan dilandasi keikhlasan. Di samping itu, PNPM Mandiri juga berlandaskan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang positif yang mana nilai-nilai tersebut secara tidak langsung mengajarkan pendidikan pada masyarakat. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui nilai-nilai luhur yang melandasi pelaksanaan PNPM Mandiri sebagai nilai pendidikan Islam. Dengan menggunakan penelitian *library reseach*, masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang terkandung dalam PNPM Mandiri sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Sedangkan tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang terkandung dalam PNPM Mandiri.

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah dalam hasil penelitian ini diharapkan hasilnya menjadi sumbangsih dan memperkaya khasanah pemikiran ke-Islaman pada umumnya

⁷ DPU DirJen, Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri P2KP, Jakarta: Cipta Karya, 2007, hlm. 18.

⁸ DPU DirJen, Pedoman Umum P2KP 3, Jakarta: Cipta Karya, 2005, hlm. 2.

dan bagi masyarakat khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memberikan atau melaksanakan suatu pendidikan baik itu melalui lembaga formal, informal maupun non formal.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) atau penelitian kepustakaan murni. Yaitu untuk memperoleh data-data yang bersumber dari buku-buku yang ada hubungan dengan penulisan artikel ini.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Nilai-Nilai Islam

Menurut Burbecher, nilai dibedakan dalam dua bagian yaitu nilai instrinsik yang di anggap baik, tidak untuk sesuatu yang lain⁹, melainkan di dalam dirinya sendiri) dan nilai instrumental (nilai yang di anggap baik karena bernilai untuk yang lain. Nilai menurut Abu Ahmadi dan Noor Salimi,¹⁰ adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan, maupun perilaku. Sedangkan menurut Hamid Darmadi,¹¹ mengemukakan nilai atau value termasuk bidang kajian tentang filsafat. Istilah nilai dalam bidang filsafat di pakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya “keberhargaan” atau kebaikan, dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.

Adapun pengertian pendidikan Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia seutuhnya, beriman dan bertaqwakepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang berdasarkan pada ajaran Al- Quran dan Sunnah.¹²

Dari uraian di atas mengenai pengertian nilai dan pendidikan Islam, maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan dalam diri manusia yang sesuai dengan norma dan ajaran Islam untuk menciptakan insan kamil (manusia sempurna).

⁹ Jalaludin & Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan Manusia*, Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2007, hlm. 137.

¹⁰ A.Ahmadi, Nor S, *MKDU Dasar Dasar Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, hlm. 667.

¹¹ Hamid Darmadi, *Dasar konsep Pendidikan Moral, Landasan Konsep Dasar dan Implementasi*, Bandung: Alfabeta, 2007, hlm. 67.

¹² Armai Arief, *Pengantar ilmu dan metodologi pendidikan islam*, Jakart: Cip - tat Pers, 2002, hlm. 3.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengenai nilai-nilai pendidikan Islam, maka sesungguhnya Al-Quran pun memuat nilai-nilai yang menjadi acuan dalam pendidikan Islam.

Nilai tersebut terdiri atas tiga pilar utama, yaitu: nilai *I'tiqodiyah*, nilai *Khuluqiyah*, dan nilai *Amaliyah*.¹³

a. Nilai I'tiqodiyah

Nilai I'tiqodiyah ini biasa di sebut dengan aqidah.¹⁴ Nilai *I'tiqodiyah* yaitu nilai yang berkaitan dengan pendidikan keimanan seperti percaya kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, dan takdir yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu.

Islam berpangkal pada keyakinan tauhid, yaitu keyakinan tentang wujud Allah, tak ada yang menyamai-Nya, baik sifat maupun perbuatan. Pernyataan tauhid paling singkat adalah bacaan tahlil. Dalam penjabarannya aqidah berpokok pada ajaran yang tercantum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Malaikat-Malaikat Allah, iman kepada Kitab-Kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir.

b. Nilai Khuluqiyah

Nilai *Khuluqiyah* yaitu ajaran tentang hal yang baik dan hal yang buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Akhlak biasa di sebut dengan moral.¹⁵ Akhlak ini menyangkut moral dan etika yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku yang tercela dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji.

Apabila seseorang mempunyai perilaku dan perangai yang baik, maka boleh dikatakan bahwa dia mempunyai akhlak yang baik. Begitupun sebaliknya, jika seseorang mempunyai perilaku dan perangai yang buruk, maka boleh dikatakan bahwa dia mempunyai akhlak yang buruk. Nilai ini meliputi tolong menolong, kasih sayang, syukur, sopan santun, pemaaf, disiplin, menepati janji, jujur, tanggung jawab dan lain-lain.

c. Nilai Amaliyah

Nilai *Amaliyah* yaitu yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari baik yang berhubungan dengan:

1) Pendidikan Ibadah

Pendidikan ini memuat hubungan antara manusia dengan Allah, seperti salat,

¹³ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Ke - cana Prenada Media, 2006, hlm. 36.

¹⁴ Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 19.

¹⁵ H. M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Sekolah: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm. 57.

puasa, zakat, haji, dan nazar, yang bertujuan untuk aktualisasi nilai '*ubudiyah*'.¹⁶ Nilai ibadah ini biasa kita kenal dengan rukun Islam, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji.

2) Pendidikan Muamalah

Pendidikan ini memuat hubungan antar sesama manusia baik secara individu maupun institusional.¹⁷ Bagian ini terdiri atas:

- 1) Pendidikan *Syakhshiyah*, perilaku individu seperti masalah perkawinan, hubungan suami istri dan keluarga serta kerabat dekat, yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah dan sejahtera.
- 2) Pendidikan *Madaniyah*, perilaku yang berhubungan dengan perdagangan seperti upah, gadai, kongsi, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengelola harta benda atau hak-hak individu.

2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Ambar Teguh,¹⁸ menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti:

1. *To give power or authority*, meliputi pemberian kekuasaan, mengalihkan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.
2. *To give ability to or enable* yaitu memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Jadi pada dasarnya, dari beberapa pendapat di atas yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri.

Di samping itu, prinsip dasar yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat menurut Randy dan Riant,¹⁹ yaitu:

1. Good governance: keterbukaan, partisipasi, demokrasi, akuntabilitas.
2. Desentralisasi dan otonomi daerah.
3. Nilai-nilai universal: kerelaan, jujur, adil, kesetaraan gender.
4. Pembangunan berkelanjutan, sosial ekonomi, ekologi.
5. Masyarakat sebagai pelaku pembangunan.

¹⁶ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam, ..., Ibid, hlm. 36.

¹⁷ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam, ..., Ibid, hlm. 36.

¹⁸ Ambar Teguh, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, ..., Ibid, hlm. 77-78.

¹⁹ Randy, R. W dan Riant, N.D, Manajemen Pemberdayaan: Sebuah pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat, ..., Ibid, hlm. 284.

6. Perencanaan partisipatif.

3. PNPM Mandiri

Yang dimaksud dengan istilah PNPM Mandiri yaitu program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.²⁰

Adapun tujuan pelaksanaan PNPM Mandiri program penanggulangan kemiskinan di perkotaan adalah:

1. Mewujudkan masyarakat “berdaya” dan “mandiri”, yang mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya, sejalan dengan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan masyarakat dan kelompok peduli setempat.
3. Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi penanggulangan kemiskinan.
4. Meningkatkan capaian manfaat bagi masyarakat miskin untuk mendorong peningkatan IPM dan pencapaian sasaran MDGs.²¹

Mengingat bahwa Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan adalah landasan dan pemicu tumbuhnya gerakan pembangunan berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan, maka di perlukan rumusan visi dan misi yang jelas sehingga dapat di pakai sebagai acuan perilaku dan arahan bagi semua pelaku PNPM maupun bagi para pihak dalam mengembangkan program-program kemiskinan di wilayahnya.

1. Visi program penanggulangan kemiskinan di perkotaan: terwujudnya masyarakat madani, yang maju, mandiri, dan sejahtera dalam lingkungan permukiman sehat, produktif dan lestari.
2. Misi program penanggulangan kemiskinan di perkotaan: membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu

²⁰ http://www.pnpm_mandiri.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid+51&Itemid=46.

²¹ DPU DirJen, ,Panduan Diskusi Refleksi Kemiskinan, Jakarta: Cipta Karya, 2007, hlm. 2.

mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan.²²

Dalam PNPM Mandiri program penanggulangan kemiskinan di perkotaan, proses pendampingan untuk pembelajaran dilakukan melalui tahapan yang di sebut dengan siklus PNPM program penanggulangan kemiskinan di perkotaan.²³ Adapun siklusnya sebagai berikut:

1. Rembug Kesiapan Masyarakat
2. Refleksi Kemiskinan
3. Pemetaan Swadaya
4. Membangun BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)
5. Pengembangan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

Seperti yang telah dikemukakan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan dalam diri manusia yang sesuai dengan norma dan ajaranislam untuk menciptakan insan kamil (manusia sempurna).

Nilai-nilai tersebut terdiri dari tiga pilar utama, yaitu nilai *i'tiqodiyah*, nilai *khuluqiyah*, dan nilai *amaliyah*. Setelah menganalisa penulis menemukan bahwa dalam PNPM Mandiri program penanggulangan kemiskinan di perkotaan memuat nilai-nilai pendidikan Islam, yaitu:

1. Nilai *I'tiqodiyah*

Nilai ini berkaitan dengan nilai akidah (keimanan) seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa penjabaran dari akidah ini biasa disebut dengan rukun iman, yakni mengenai keimanan kepada Allah, malaikat, rasul, kiamat dan takdir. Dalam PNPM mandiri program penanggulangan kemiskinan di perkotaan tidak terdapat/mengandung nilai *i'tiqodiyah*.

2. Nilai *Khuluqiyah*

Nilai *khuluqiyah* berkaitan dengan nilai akhlak, moral dan etika seperti telah di jelaskan sebelumnya bahwa akhlak adalah ajaran tentang hal yang baik dari hal yang buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Jika seseorang mempunyai tingkah laku dan perangai yang baik maka boleh dikatakan bahwa dia mempunyai akhlak yang baik, begitu sebaliknya jika seseorang mempunyai tingkah laku dan perangai yang buruk, maka boleh dikatakan bahwa dia mempunyai akhlak yang buruk.

Adapun nilai-nilai akhlak (*khuluqiyah*) yang terkandung dalam PNPM mandiri

²² DPU DirJen, Pedoman Teknis Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan, J - karta: Cipta Karya, 2007, hlm. 6.

²³ DPU DirJen, Panduan Fasilitasi Rembug Kesiapan Masyarakat. Jakarta: Cipta Karya, 2007, hlm. 1.

program penanggulangan kemiskinan di perkotaan terdapat dalam nilai universal kemanusiaan yaituantara lain:

a. Jujur

Hal yang tercermin dalam pembangunan BKM, yang mana BKM sebagai dewan pimpinan kolektif bertanggungjawab untuk menggerakkan potensi warga masyarakat kelurahan untuk menanggulangi kemiskinan, oleh sebab itu mempunyai tugas untuk membangun modal sosial diwilayahnya. Modal sosial yang harus dibangun yaitu menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan diantara anggota BKM, antara BKM dengan warga masyarakat, antar kelompok masyarakat, antara BKM, masyarakat dan pihak luar. Dalam proses ini keterbukaan dan kejujuran diantara anggota BKM merupakan unsur yang paling penting untuk bekerjasama. Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa dalam pembangunan BKM mengajarkan kepada masyarakat untuk selalu berbuat jujur dalam setiap hal.

b. Dapat dipercaya (amanah)

Amanah merupakan salah satu sifat wajib nabi muhammad Saw., sifat mahmudah yang patut kita teladani sebagai seorang muslim, meskipun itu tidak mudah. Nilai amanah dalam program penanggulangan kemiskinan di perkotaan tercermin dalam:

- 1) Pembangunan BKM, seperti terlihat dalam ciri-ciri organisasi masyarakat warga yaitu membangun masyarakat saling percaya.
- 2) Pengembangan KSM, sikap saling percaya diantara anggota kelompok didasari dan dibangun dalam suasana keterbukaan, kejujuran, keikhlasan, saling menghargai, saling peduli, keadilan, dan nilai-nilai positif lainnya.

c. Ikhlas/Kerelawanan

Nilai ini ikhlas/kerelawanan ini tercermin dalam:

- a. Pembangunan BKM, tiap anggota/warga terhimpun secara suka rela bukan karena terpaksa. Dengan demikian jelas bahwa setiap individu yang ingin menjadi anggota BKM benar-benar atas kemauannya sendiri.
- b. RKM, dalam salah satu hasil yang diharapkan yaitu adanya relawan-relawan warga sebagai motor penggerak penanggulangan kemiskinan.

Berbuat ikhlas dalam segala hal merupakan anjuran ajaran islam, amal yang ikhlas adalah yang semata mata karena Allah tidak karena yang lainnya karena ikhlas

sangat berkaitan dengan kerja hati seseorang.²⁴

d. Adil

Dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan harus menekankan asas keadilan (fairness), kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat miskin. Nilai adil ini tercermin dalam:

- 1) Pengembangan BKM, dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh masyarakat harus dikelola dengan jujur dan adil, di mana adil disini bukan berarti bagi rata tetapi menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan nyata bukan untuk kepentingan pribadi.
- 2) Pengembangan KSM, dalam salah satu prinsipnya yaitu keadilan. dari kedua uraian di atas jelas terlihat bahwa program penanggulangan kemiskinan di perkotaan mengajarkan kepada masyarakat untuk berbuat adil.

2. Nilai *Amaliyah*

Nilai amaliyah yang terkandung dalam PNPM Mandiri program penanggulangan kemiskinan di perkotaan terdapat dalam nilai kemasyarakatan yaitu antara lain:

a. Kesetaraan

Nilai ini tercermin dalam:

- 1) Pembangunan BKM, dalam pembangunan BKM ini mengajarkan kepada masyarakat adanya kesetaraan di mana komunitas terbentuk sebagai himpunan warga yang setara.
- 2) Pengembangan KSM, salah satu prinsipnya adalah kesetaraan, semua anggota kelompok mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak ada keistimewaan termasuk bagi para pengurus kelompok.

Dari uraian tersebut terlihat jelas dengan adanya kesetaraan dalam masyarakat akan menjadikan masyarakat yang saling memiliki, tidak ada perbedaan dalam segala hal yang mana dalam ayat di atas juga diterangkan bahwa Allah SWT menjadikan umat-Nya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Dengan keadaan yang demikian maka akan tercipta suasana kehidupan yang nyaman dan damai.

b. Kesatuan dalam keberagaman

Kesatuan dalam keberagaman ini sesuai dengan surat Al Hujurat ayat 13 yang

²⁴ Erwati Aziz, Prinsip-prinsip Pendidikan Islam. Solo: Tiga Serangkai, 2003, hlm. 37.

menerangkan bahwa Allah menjadikan kita (manusia) berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nilai ini tercermin dalam:

- 1) Pemetaan Swadaya, dalam pemetaan swadaya ini mengajarkan kepada masyarakat baik perempuan maupun laki-laki dapat menyadari persoalan kehidupan dalam lingkungan yang mereka hadapi, sehingga diharapkan terjadi pemahaman terhadap kondisi warga di lingkungannya.
- 2) Pembangunan BKM, mengajarkan kepada masyarakat warganya untuk selalu menghargai keragaman dan hak asasi manusia sebagai dasar membangun sinergi.
- 3) Refleksi kemiskinan, dalam salah satu tujuannya mengajarkan kepada masyarakat untuk mewujudkan rasa memiliki masyarakat miskin dan peduli masyarakat lainnya terhadap upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

c. Demokrasi

Nilai ini tercermin dalam pembangunan BKM, mengajarkan kepada masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam setiap keputusan yang diambil secara intensif melakukan musyawarah.

Kemampuan masyarakat bermusyawarah yang dilandasi kesadaran kritis untuk senantiasa menuju kebaikan bersama, pada hakekatnya merupakan manifestasi tertinggi dari suatu kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan di perkotaan mendorong masyarakat agar dapat mengutamakan dan mendasarkan keputusan melalui mekanisme musyawarah agar mampu membangun dan memperkuat lembagapimpinan kolektif masyarakat.

d. Transparansi

Dalam proses manajemen program maupun manajemen organisasi masyarakat harus menerapkan prinsip transparansi, sehingga masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya. Nilai ini tercermin dalam:

Pengembangan KSM, mengajarkan kepada masyarakat melalui salah satu prinsipnya yaitu saling mempercayai dan saling mendukung (keterbukaan). Dengan demikian diharapkan dapat mendorong para anggota untuk mengekspresikan gagasan-gagasan dan perasaannya dengan nyaman sehingga terhindar dari rasa saling curiga, fitnah, dan konflik-konflik di antara warga masyarakat.

Pelaksanaan dan pemantauan program, dalam pelaksanaan kegiatan diajarkan

kepada masyarakat untuk membangun keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Partisipasi

Dalam tiap langkah kegiatan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan harus dilakukan secara partisipatif sehingga mampu membangun rasa kepedulian dan kepemilikan serta proses belajar melalui bekerja sama.

Nilai ini terdapat dalam pengembangan KSM, yangmana mengajarkan kepada masyarakat melalui prinsipnya yaitu berpartisipasi nyata bahwa setiap anggota wajib berkontribusi kepada kelompok sebagai wujud komitmen dalam rangka keswadayaan serta ikatan kelompok.

Jadi pada dasarnya nilai-nilai tersebut (nilai khuluqiyah dan amaliyah) yang terkandung dalam PNPM Mandiri program penanggulangan kemiskinan di perkotaan tercermin dalam siklus PNPM mandiri program penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Dengan demikian jelas bahwa nilai-nilai yang diajarkan dalam program penanggulangan kemiskinan di perkotaan merupakan nilai dalam pemberdayaan masyarakat yaitu prinsip good governance dan prinsip nilai-nilai universal.

KESIMPULAN

Pembangunan negara berkembang selalu dilatarbelakangi oleh permasalahan keterbelakangan, kemiskinan, dan pengangguran. Krisis ekonomi pada pertengahan 1997 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi meningkat. Dampak keseluruhan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia adalah bertambahnya jumlah rumah tangga miskin di pedesaan maupun perkotaan, rusaknya struktur sosial yang disebabkan hilangnya pekerjaan dan hilangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. PNPM Mandiri program penanggulangan kemiskinan di perkotaan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam PNPM Mandiri program penanggulangan kemiskinan di perkotaan terdapat nilai-nilai pendidikan Islam, nilai-nilai yang diajarkan dalam PNPM Mandiri program penanggulangan kemiskinan di perkotaan adalah sebagaiberikut: Nilai Khuluqiyah dan Nilai amaliyah:

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Nor S, MKDU Dasar Dasar Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Al-Imam Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf An-Nawawi diterjemahkan Achmad Sunarto, Terjemahan Riyadhus Shalihin, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

Arief, Armai, Pengantar ilmu dan metodologi pendidikan islam, Jakart: Ciputat Pers, 2002.

Arifin, H. M., Ilmu Pendidikan Islam Sekolah: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Aziz, Erwati, Prinsip-prinsip Pendidikan Islam. Solo: Tiga Serangkai, 2003.

Crescent, Tim, Menuju Masyarakat Mandiri: Pengembangan Sistem Keterjaminan Sosial, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

CSIS, Pemberdayaan Masyarakat Lapis Bawah Center for setrategis and International Studies/ jurnal, 1997.

Daradjat, Zakiah, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 19.

Darmadi, Hamid, Dasar konsep Pendidikan Moral, Landasan Konsep Dasar dan Implementasi, Bandung: Alfabeta, 2007.

DPU DirJen, Panduan Diskusi Refleksi Kemiskinan, Jakarta: Cipta Karya, 2007.

, Panduan Fasilitasi Rembug Kesiapan Masyarakat.

Jakarta: Cipta Karya, 2007.

, Pedoman Teknis Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan, Jakarta: Cipta Karya, 2007.

, Pedoman Umum P2KP 3, Jakarta: CiptaKarya, 2005.

, Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri P2KP, Jakarta:Cipta Karya, 2007. Farihah,

Irzum, "Strategi Dakwah Di Tengah Konflik Masyarakat",

Jurnal Addin, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2014.

http://www.pnpm_mandiri.org/index.php?option=com_

[docman&task=cat_view&gid+51&Itemid=46.](http://www.pnpm_mandiri.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid+51&Itemid=46)

Jalaludin & Abdullah Idi, Filsafat Pendidkan Manusia, Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2007.

Moleong, Lexi, J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 1999.

Randy, R.W dan Riant, N.D, Manajement Pemberdayaan: Sebuah pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.

S, Ambar Teguh, Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan, Yogyakarta: Gava Media, 2004

Sumodiningrat, Gunawan, Pemberdayaan Sosial, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2007.

Usman, Sunyoto, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Zed Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan OborIndonesia, 2004.